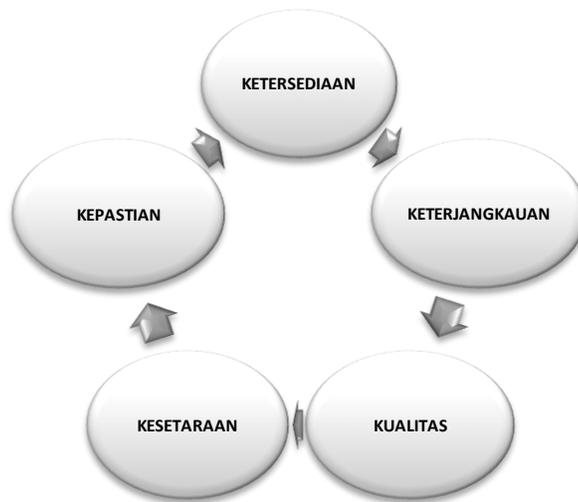


# RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.

Penjabaran RKPD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja ( Renja ) SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2018. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Implementasi rencana kerja beserta estimasi biaya yang diperlukan sebagaimana pada lampiran adalah untuk 11 Program kerja yang terbagi menjadi 82 jenis kegiatan yang bersumber dari APBD TK II , 10 Kegiatan yang dibiayai dana Sharing APBD TK I dan 4 kegiatan yang dibiayai APBN melalui dana DAK .

Demikianlah Rencana Kerja tahun 2018 dibuat untuk dapat dipergunakan untuk Penetapan KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Terima kasih

Painan,     Maret 2018  
Kepala Dinas Pendidikan

**H.ZULKIFLI,S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 195912311985121005**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja(Renja) SKPD Dinas Pendidikan merupakan komponen utama dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berisikan evaluasi pencapaian program sampai tahun berjalan serta prioritas program SKPD Dinas Pendidikan tahun 2018. Renja juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya Rencana Kerja ini, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rencana Kerja ini yang berisikan analisis dan evaluasi pencapaian program sampai tahun berjalan serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

### **B. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
7. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008.
13. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 - 2019
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
15. Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra) tahun 2016-2021

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menyusun suatu Rencana Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 bidang pendidikan berdasarkan usulan masyarakat, usulan penyelenggara satuan pendidikan serta melalui Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

Renja ini bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman pembangunan bidang pendidikan sehingga dapat lebih efisien dan efektif serta mempertajam program pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah( RKPD) Pesisir Selatan tahun 2018.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun melalui proses Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dengan melibatkan UPTD, kepala sekolah melalui MKKS, pengawas, dewan pendidikan dan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan maupun Forum SKPD ditingkat Kabupaten.

Renstra ini selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh tim yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan Subbag dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang; Maksud dan Tujuan; Landasan Hukum; Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; Sistematika Renja.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang : kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisi tentang : Analisis Lingkungan Strategis; Isu-isu strategis.

BAB IV : PENUTUP, berisi tentang : catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013**

#### **A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN CAPAIN RENSTRA 2016-2021**

Berdasar Renstra Pendidikan tahun 2016-2021 , agenda Pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui 5 (lima ) prioritas pembangunan pendidikan:

1. Ketersediaan layanan pendidikan
2. Keterjangkauan layanan pendidikan
3. Kualitas layanan pendidikan
4. Kesetaraan layanan pendidikan
5. Kepastian layanan pendidikan

#### **B. GAMBARAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN**

Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dicapai dari tahun 2010 sampai 2016 antara lain sebagai berikut :

##### **1. Ketersediaan layanan pendidikan :**

- a. Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan (2 SD dan SMP : 2,), Kursus, sebanyak 20 lembaga, dan 202 lembaga PAUD.
- b. Rehabilitasi Ruang Kelas, ruang guru, dan ruang penunjang lainnya
- c. Pembangunan Ruang Kelas Baru, sehingga ratio jumlah kelas dengan jumlah siswa hampir terpenuhi (ratio 1 : 25 )
- d. Pengadaan meubilier kelas, baru terpenuhi sekitar 75 % dari kebutuhan disemua jenjang pendidikan.
- e. Pembangunan 129 buah ruang Pustaka SD.

##### **2. Kualitas Layanan Pendidikan :**

- a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik sebagai tenaga fungsional yang profesional:
  - 1) Sertifikasi guru dari jumlah 7.226 yang ada, telah disertifikasi sebanyak 3.780 dengan rincian sbb :  
2010 : 471 org

2011 : 555 org

2012 : 500 org

2013 : 669 org

2014 : 702 org

2015 : 323 org

2016 : 140 org

- 2) Kualifikasi pendidikan guru SD/MI yang belum S1 : 961 org dan yang sudah S1 atau lebih sebanyak : 3.751 org , guru SMP yang belum S1: 62 org dan yang sudah S1 atau lebih sebanyak 956 org sementara itu guru SLTA yang belum S1 sebanyak 23 org terdiri SMA 16 org dan SMK 7 org.
  - 3) Bimtek OSN bagi guru mata pelajaran sebanyak 30 orang guru SMP/MTs mata pelajaran (Matematika, IPS dan IPA) dan 70 orang Guru SMA/MA mata pelajaran (Matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, geo-sains, computer dan Astronomi )
  - 4) Pelatihan Manajemen Sekolah yang terdiri dari 350 Kepala Sekolah SD yang telah dilatih.
  - 5) Pelatihan Manajemen Sekolah yang terdiri dari 150 Kepala Sekolah SMP ,SMA dan SMK .
- b. Pengembangan pembelajaran :
- 1) Pembimbingan penyusunan KTSP bagi SMA sebanyak 22 sekolah, SMK 14 sekolah, SMP 68 sekolah , dan SD 384 sekolah.
  - 2) Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan KKG pada 64 gugus dan 10 MGMP/SMP/MTs serta 10 MGMP-SMA.
  - 3) Pembinaan lembaga PAUD sebanyak 238
- c. Pengembangan Pengelolaan Sekolah :
- 1) Pelaksanaan kegiatan MBS pada setiap satuan pendidikan
  - 2) Pelaksanaan dan Pembinaan Akreditasi disekolah pada semua jenjang pendidikan.
- d. Peningkatan kualitas peserta didik
- 1) Pembimbingan OSN kepada 1020 orang siswa SMP dan SMA 2.940
  - 2) Lomba Kreatifitas siswa
  - 3) Lomba mata pelajaran
  - 4) Olimpiade olah raga siswa nasional (O2SN) dan F2LSN
- e. Peningkatan mutu layanan dan Mata Pelajaran yang di UASBN/UN kan :

- 1) Pengayaan dan try out bagi siswa kelas VI SD/MI, siswa kelas III SMP/MTs dan SMA/SMK.
  - 2) Praktik Kerja Industri dan Pendidikan Sistem Ganda bagi siswa kelas II SMK
- f. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran :
- 1) Pengadaan alat dan bahan praktik
  - 2) Pengadaan Lembar Kerja Siswa
  - 3) Pelaksanaan Pemetaan KIs di beberapa sekolah khususnya RSBI dan SSN
  - 4) Pengadaan buku Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP dan SMA
  - 5) Pelaksanaan sistem guru mata pelajaran di beberapa SD yang telah memenuhi jumlah kebutuhan guru, agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif
- g. Pembinaan akhlak dan budi pekerti peserta didik
- 1) Pesantren kilat setiap bulan ramadhan pada setiap jenjang pendidikan
  - 2) Pembelajaran pendidikan al-Qur'an pada semua jenjang pendidikan
  - 3) Menghafal ayat-ayat pendek setiap awal mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan
  - 4) Peringatan hari besar keagamaan (Maulid dan Isra' Mi'Raj) disetiap sekolah

### **3. Keterjangkauan Layanan Pendidikan**

- a. Pendataan siswa kurang mampu di setiap sekolah
- b. Memberikan subsidi dana BSM bagi siswa yang kurang mampu sebanyak 23.103 orang

### **4. Kepastian Layanan Pendidikan**

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat :
  - 1) melakukan kerjasama dengan media cetak dalam meningkatkan sosialisasi berbagai kebijakan pendidikan
  - 2) melaksanakan workshop pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  - 3) melakukan kerja sama dengan Dewan Pendidikan, PGRI dan masyarakat serta pemerhati Pendidikan dalam menyusun beberapa regulasi pendidikan
  - 4) bekerja sama dengan beberapa BUMN dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan
- b. Pelaksanaan MBS :
  - 1) Menerapkan Management Berbasis Sekolah (MBS) disetiap jenjang pendidikan

- 2) Melakukan sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah kepada semua kepala sekolah
  - 3) Menyusun pedoman pelaksanaan MBS
- c. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun :
- 1) Bekerjasama PGRI ,Wali Nagari dan perangkat Nagari, LSM Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam melakukan pendataan anak putus sekolah.
  - 2) Melakukan sosialisasi Tuntas Wajar 12 Tahun pada masyarakat yang penduduknya banyak putus sekolah melalui kegiatan retrival dan transisi
  - 3) Memberi rekomendasi kepada semua anak usia SD dan SMP yang putus Sekolah untuk memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun pelajaran 2016/2017

## **5. Kesetaraan Layanan Pendidikan**

- a. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ( Paket A, Paket B dan Paket C)  
Paket A 80 Warga Belajar ( WB)

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **A. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan**

Guna Mewujud pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta terlesatarikannya kebudayaan lokal dinas pendidikan dan kebudayaan berupaya untuk mewujudkan pembangunan kabupaten pesisir selatan dibidang pendidikan, maka pada tahun 2018 ini dinas pendidikan merencanakan 5( lima ) prioritas arah pembangunan yang juga merupakan misi dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga dikenal dengan 5K yaitu :

- a. Ketersediaan Layanan Pendidikan (K1)
- b. Keterjangkauan Layanan Pendidikan (K2)
- c. Kualitas Layanan Pendidikan (K3)
- d. Kesetaraan Layanan Pendidikan (K4)
- e. Kepastian Layanan Pendidikan (K5)

- **Ketersediaan layanan pendidikan**

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjanglainnya.

- **Keterjangkauan layanan pendidikan**

Hal ini merupakan usaha untuk Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

- **Kualitas layanan pendidikan**

Dimaksudkan sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangkameningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

- **Kesetaraan layanan pendidikan**

Dimaksudkan untuk Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.

- **Kepastian Layanan pendidikan**

Dimaksudkan untuk Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan

bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.

•

## B. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Pesisir selatan yakni “ Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera “ maka Dinas Pendidikan selaku stekholder Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang Pendidikan berupaya menjalankan agenda I arah strategi pembangunan daerah yaitu pembangunan Sosial Budaya. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan, dengan memprioritaskan pada :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah hingga 75 % sekolah berada dalam kondisi layak.
- b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- c. Meningkatkan APK dan APM PAUD,SD dan SLTP
- d. Peningkatan layanan PAUD hingga 90 % dari jumlah kampung di pesisir selatan
- e. Penurunan angka putus sekolah disetiap tingkatan
- f. Mengurangi persentase guru yang mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2016-2021 serta program dan kegiatan prioritas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENTSR A)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya akses dan kualitas	1. Rata - rata lama	8,2 tahun	Meningkatnya Akses	APK PAUD	45,29	45,38	45,47	45,56	45,65	45,75

	layanan pendidikan	sekolah		Layanan Pendidikan							
					APK SD	124,22	124,2	124,18	124,16	124,14	124,12
					APK SMP	101,61	102,32	103,04	103,76	104,49	105,77
					APM SD	99,22	99,38	99,51	99,64	99,81	99,9
					APM SMP	89,9	89,9	90,08	90,17	90,26	90,72
					Angka Putus Sekolah	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07
		2. Harapan Lama Sekolah	13,2 tahun	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	55	60	65	70	75	80
					Rata-rata nilai UN	6,5	6,55	6,6	6,65	6,7	6,75
2	Meningkatnya pengembangan Seni dan Budaya	1. Persentase cakupan seni dan budaya	55%	Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	Persentase jumlah seni budaya yang dilestarikan	25	30	35	40	45	50
				Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	35	40	45	50	55	60

Guna mewujudkan usaha pembangunan tersebut, Dinas pendidikan merencanakan 10 Program kerja yang tersebar dalam bentuk 139 kegiatan. Kegiatan ini berupa kegiatan rutin perkantoran ( 24 kegiatan ). Kegiatan untuk mewujudkan Peningkatan Akses Pendidikan (99 kegiatan), kualitas layanan pendidikan ( 16 kegiatan ) dan Kebudayaan (32).

Adapun dana yang dibutuhkan sebesar **Rp. 44.003.184,000** (empat puluh empat miliar tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) melalui Dana APBD Tk II.

Berikut Rincian dana per kegiatanyang diusulkan untuk tahun 2017 Melalui Dana APBD Tk II :

	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.052.023.700</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160.000.000
2	Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah	110.000.000
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	200.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	47.000.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.000.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	134.000.000,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43.000.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.000.000,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	115.000.000,00
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.000.000,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	76.000.000,00
13	Penunjang Operasional Perencanaan dan pelaporan	75.000.000,00
14	Penyediaan Biaya Operasional Unit kerja bawahan	1.200.000.000,00
15	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	1.500.000.000,00
16	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah	150.000.000,00
	<b>PROGRAM PENINGATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>12.202.674.000</b>
17	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	36.674.000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas kantor	124.000.000
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kantor	42.000.000
20	Rehap Sedang/Berat Gedung/kantor Pemerintah (kantor Dinas Pendidikan )	6.000.000.000
21	Pengadaan Mobiler Sekolah	2.000.000.000
22	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah	2.000.000.000
23	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan	2.000.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>258.000.000</b>
24	Pengadaan mesin absensi	80.000.000
25	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai	178.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>2.448.000.000</b>
26	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000
27	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000
28	Pelatihan penata usahaan keuangan	520.000.000
29	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000
30	Verifikasi dan Monitoring Dana Bansos lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan	120.000.000
31	Verifikasi tunjangan tambahan penghasilan guru	180.000.000
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>1.450.000.000</b>

32	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	300.000.000
33	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini	150.000.000
34	Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak	300.000.000
35	Magang Tenaga Pendidikan PAUD	250.000.000
36	Pelatihan Verifikasi bantuan program PTK PAUD 2015	300.000.000
37	Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan	150.000.000
	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>5.947.000.000</b>
38	Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	460.000.000
39	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar ( SD)	125.000.000
40	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000
41	Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	500.000.000
42	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD dan SMP	140.000.000
43	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	350.000.000
44	Operasional Sarana mobilitas sekolah di Daerah terpencil	112.000.000
45	Bintek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP	900.000.000
46	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	250.000.000
47	Penyebarluasan, dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan Dasar	190.000.000
48	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana BOS	120.000.000
49	Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tahun 2017 tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	250.000.000
50	Lomba Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) Pendidikan Dasar	150.000.000
51	Pendidikan Karakter SD dan SMP	250.000.000
52	Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif	450.000.000
53	Bimtek Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti	450.000.000
54	Pemberian bantuan Dana bagi Guru yang mengabdikan di daerah khusus yang tidak menerima Subsidi Tunjangan Daerah Khusus ( terpencil )	450.000.000
55	Pembinaan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan ( SBSNP)	250.000.000
56	Pembinaan Guru Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif	300.000.000
57	Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP	150.000.000
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>1.352.551.400</b>
58	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	48.000.000
59	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	369.000.000
60	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	100.000.000
61	Penyelenggaraan Paket B	197.025.200
62	Penyelenggaraan Paket C	227.526.200
63	Peningkatan Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM	77.000.000
64	Retrival dan Transisi	230.000.000
69	Penyelenggaraan UNPK Paket B	45.000.000
70	Penyelenggaraan UNPK Paket C	59.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA</b>	<b>13.337.786.350</b>

	<b>KEPENDIDIKAN</b>	
71	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	100.000.000
72	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	110.000.000
73	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPP-G)	400.000.000
74	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	85.000.000
75	Pengembangan sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	249.060.350
76	Penilaian Angka Kredit	254.730.000
77	Sosialisasi Juknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya	148.996.000
78	Peningkatan Kompetensi GTK Pembelajaran	1.400.000.000
79	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal Pendidikan Dasar	90.000.000
80	Penyediaan Insentif Daerah bagi tenaga Operator Dapodik, Penjaga Sekolah dan guru bukan PNS	10.500.000.000
	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>740.000.000</b>
81	Penerapan sistem informasi manajemen pendidik	65.000.000
82	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan	110.000.000
83	Sosialisasi dan Updating data Pokok Pendidikan ( Dapodik )	110.000.000
84	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	550.000.000
85	Biaya Operasional Penyusunan Renja, TAPKIN, RKPD, RPKD, KUA-PPAS, RKA, DPA, Lakip, LKPJ, LPPD dan EPPD Bidang Pendidikan	80.000.000
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA</b>	<b>195.000.000</b>
86	Lomba Tingkat Pendidikan Luar Biasa	120.000.000
87	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus	75.000.000
		<b>25.168.408.460</b>
	<b>PROGRAM KEBUDAYAAN</b>	
88	Atraksi seni Tk.SD, SMP dan SLTA	128.725.500
89	Peragaan dan Pendokumentasian Tari Rantak Kudo oleh sanggar seni se Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelestarian tari tradisional	1.314.949.420
90	Analisis oleh tim ahli seni tari, ninik mamak hasil dokumentasi tari rantak kudo yang telah diperagakan oleh sanggar se Kabupaten Pesisir Selatan	399.174.920
91	Pengukuhan Hak Paten Tari Rantak Kudo sebagai Tari Tradisi Kepunyaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	150.000.000
92	Carocok Internasional Dance Festival	1.200.000.000
93	Workshop Musik dan Tari Bente untuk Guru Seni SMP dan SMA serta Sanggar se-Kabupaten Pesisir Selatan	400.000.000
94	Peragaan dan pendokumentasian tari bente oleh sanggar seni se Kabupaten Pesisir Selatan	650.000.000
95	Pengukuhan Rekor Muri Penari Tari Bente terbanyak se- Kabupaten Pesisir Selatan	750.000.000
96	Analisis oleh tim ahli seni tari, ninik mamak hasil dokumentasi tari	75.000.000

	benten yang telah diperagakan oleh sanggar se Kabupaten Pesisir Selatan	
97	Bantuan Sanggar-sanggar yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	550.500.000
98	Pengadaan alat-alat produksi film	219.000.000
99	Pengadaan pentas Ringging Stage	767.154.000
100	Pengadaan Alat-alat Studio Televisi dan Film	210.904.000
101	Pengadaan Alat Pemancar Stasiun Televisi dan Film 100 watt, Radius Tangkapan 25 Km dengan tinggi Tower sekitat 30 sampai 50 meter	225.000.000
102	Workshop Pembuatan Film Pendek dan Film Dokumenter tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Pesisir Selatan	468.000.000
103	Festival Film Pendek dan Film Dokumenter tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Pesisir Selatan	300.000.000
104	Produksi Film Pendek tentang Pesisir Selatan	150.000.000
105	Produksi Film Dokmenter tentang Pesisir Selatan	200.000.000
106	Produksi Film Layar Lebar Dokudrama	500.000.000
107	Pembuatan Produksi Profil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	250.000.000
108	Pengadaan Sound System	1.000.000.000
109	Pengadaan Lighting	450.000.000
110	Pengadaan Genset 120 ribu watt	600.000.000
111	Pengadaan Alat-alat Studio Rekaman	225.000.000
112	Seminar Pentingnya Seni Penunjang Prestasi Siswa	250.000.000
113	Pengadaan Alat kesenian dan Pakaian Tari	291.979.120
114	Festival Band antar SMA se Provinsi Sumatera Barat	350.000.000
115	Festifal Film Dokumenter antar SMA se Provinsi Sumatera Barat	350.000.000
116	Pelatihan dan pembinaan sanggar seni se kabupaten pesisir selatan dalam pengabdian masyarakat	300.000.000
117	Pelatihan dan pembinaan guru seni budaya tingkat SD se kabupaten pesisir selatan	300.000.000
118	Pelatihan dan pembinaan guru seni budaya tingkat SMP dan SMA se kabupaten pesisir selatan	300.000.000
119	Pengiriman Tim Kesenian	750.000.000
120	Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Khitab Bullah (Guru Budaya Alam Minag Kabau Se-Kabupaten. Tk, SLTP, Lanjutan)	158.500.000
121	Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Khitab Bullah (Guru Budaya Alam Minag Kabau Se-Kabupaten. Tk, SLTP, Lanjutan)	107.500.500
122	Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Khitab Bullah Tingkat Umum	150.000.000
123	Lomba Menulis asal usul Kenegarian di dalam Kecamatan (15 Kecamatan) Tk-SLTA	75.800.000
124	Lomba Pidato adat Tk, SMP, SLTA dan Umum	165.850.000
125	Vestival Warisan Budaya dalam dan luar Negeri	350.500.000
126	Atraksi Seni Budaya Kab. Pesisir Selatan	175.600.000
127	Bantuan Sanggar-sanggar yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 1. Seperangkat baju tari persambahan serta Suntiung 2.Musik Tradisional: Rebab, Talempong, Gengang, Angklung dan lain lain 3. Seperangkat Baju Randai	450.000.000

128	Workshop Pembuatan Bungo Jamba	160.500.000
129	Festival Permainan Anak Nagari se-Kab Pessel	200.000.000
130	Renovasi Medan nan Bapaneh	2.305.000.000
131	Pembangunan rumah gadang pesisir Selatan	2.000.000.000
132	Sumarak Pesisir Selatan dengan kegiatan	600.000.000
133	Membuat buku tentang adat perkawinan yang ada di 15 Kecamatan Kab. Pesisir Selatan : Adat Meminag Marapulai/Anak daro, Adat Baiduak Bako, Adat Bapanggia/ Baju Marapulai, dll	250.800.000
134	Membuat buku tentang asal muasal suku-suku yang ada di Kab. Pesisir Selatan	185.500.000
135	Pembuatan Buku cerita asal usul nama nagari yang ada di Kab Pesisir Selatan	198.500.000
136	Pendataan Cagar Budaya Bawah air	175.500.000
137	Penetapan Cagar Budaya, Oleh Tim Ahli dari Provinsi dan tingkat Nasional	160.750.000
138	Bintek Pengelola Cakar Budaya	155.000.000
139	Pembuatan Booklet Benda Cakar Budaya yang ada di Kab Pesisir Selatan	195.500.000
140	Perawatan Cakar Budaya. Museum dan Peninggalan bawah air	167.500.000
141	Pengelolaan dan pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah, purbakala dan peninggalan bawah air	65.500.000
142	Pembuatan Liaflat Benda Cakar Budaya Kab. Pesisir Selatan	193.721.000
143	Promosi Tari Tradisional , Alat Musik Tradisional Minang Kabau dalam dan luar propinsi Sumatera Barat	450.500.000
144	Penampilan Paket Seni Modren dan tradisi	1.620.000.000
145	FL2SN	375.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>44.003.184.630</b>

#### Daftar Rencana Kerja Yang Dibiayai Melalui Dana APBN ( DAK )

	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU DANA</b>
V	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>20,909,473,000</b>
1	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2017)	10,344,500,000
2	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2017)	10,564,973,000
		<b>20,909,473,000</b>

Dengan Demikian dapat dikalkulasikana kebutuhan Anggaran unutup mewujudkan Rencana Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 64.912.657.630

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Keberadaan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pendidikan tahun 2018 merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Kegiatan tahun 2018. Target Kinerja SKPD pertahun kegiatan dapat diperkirakan melalui persentase rencana tiap tahun kegiatan. Kecendrungan perkembangan capain target milestone Dinas Pendidikan sudah mendekati target berdasarkan IKK bidang Pendidikan. Meskipun masih terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangan target kinerja diantaranya, keterbatasan anggaran kabupaten, rendahnya minat SDM dalam mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan serta faktor geografis kabupaten Pesisir selatan yang memanjang dari utara keselatan sehingga membatasi akses dan pelayanan administrasi pendidikan. Selain itu jumlah penduduk yang tergolong banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di sumatera barat disertai tingkat pertumbuhan yang mendekati angka 2 % pertahun menyebabkan jumlah masyarakat yang akan dilayani dibidang pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian melalui komitmen Pemerintah daerah yang telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun sejak tahun 2009 telah menunjukkan usaha gigih Pemda Pesisir Selatan Melalui Dinas Pendidikan untuk mengejar target-target peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah penduduk yang sebesar 452.344 jiwa ( BPS tahun 2014 ) dan luas wilayah yang mencapai 5.749,98 km<sup>2</sup>, tidak dijadikan penghambat kemajuan pendidikan tapi justru dijadikan potensi yang bisa di reduksi untuk mencapai peningkatan kinerja.